

Dampak Perubahan Kultur Masyarakat Terhadap Praktik Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia

Edi Subiyantoro

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64, Malang 65146

Saorce Elsy Hatane

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya
Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236
Email: elsyehat@petra.c.id

ABSTRAK

Penelitian ini melaporkan perubahan kultur masyarakat Indonesia dengan cara membandingkan perbedaan perspektif kultur dalam periode konglomerasi dan periode reformasi, dan hasil pengamatan dampak kultur yang berbeda tersebut terhadap keberadaan luas pengungkapan laporan keuangan. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mean variance* untuk menguji perbedaan kultur dan *two-sample t-statistic* untuk menguji keberadaan luas praktek pengungkapan laporan keuangan diantara kedua periode pengamatan. Hasil penelitian utamanya menunjukkan bahwa kultur Indonesia mengalami perubahan, dan kedua kultur yang berbeda tersebut mempengaruhi praktik pengungkapan laporan keuangan secara berbeda.

Kata kunci: pengungkapan laporan keuangan, kultur, perubahan.

ABSTRACT

This Study reports the change of Indonesian culture by comprises the different culture perspective, both conglomeration and reformation periods, and test result of the impact of different culture on the extent disclosures. Statistical instruments employed in this study are the mean variance to test the cultural difference and two-sample t-statistic to test the distinction in disclosure practices between the two periods of observation. The primary findings show that Indonesian culture has change and the both cultural differences affect disclosure practices differently.

Keywords: disclosure, culture, change.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kultur masyarakat Indonesia secara umum yaitu antara kultur masyarakat pada periode konglomerasi dan kultur masyarakat pada periode reformasi. Kemudian menguji apakah terdapat perbedaan luas pengungkapan laporan keuangan antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Diharapkan, dengan membandingkan hasil pengujian antara kedua periode di atas, bisa menjelaskan bahwa kultur sebagai faktor eksternal berdampak terhadap keberadaan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia

Pemilihan pengamatan pada periode konglomerasi dan periode reformasi didasarkan pada fakta bahwa di Indonesia pada dasawarsa terakhir ini secara

umum budaya atau kultur yang ada pada masyarakat telah bergeser karena diterjang gelombang reformasi, tak terkecuali kehidupan ekonomi. Fakta ini didukung oleh Mubyarto (1999) yang menguraikan bahwa berakhirnya periode konglomerasi (era Suharto) dan timbulnya krisis politik pada periode berikutnya yang berimbas pada terpuruknya perekonomian, telah menggeser nilai-nilai lama yang bersifat sentralistik, mengagungkan keselarasan, mengabaikan perbedaan, tidak ada transparansi, terjadi kesenjangan kekuasaan yang besar dan sebagainya, berubah menjadi lebih transparan, menjunjung desentralisasi dan profesionalisme, menerima perbedaan, bertindak fleksibel dan sebagainya. Sentralistik (otoriter), tidak transparan, adanya kesenjangan kekuasaan yang relatif besar, ketidakpastian yang tinggi merupakan nilai-nilai empiris yang mewarnai kultur pada periode

konglomerasi (1987-1994). Transparan, desentralisasi, profesional, dan menyempitnya kesenjangan kekuasaan merupakan nilai-nilai yang mewarnai kultur pada periode reformasi (1995-sekarang).

Praktik-praktik akuntansi akan selalu menjadi acuan dalam pembuatan standar akuntansi, demikian juga sebaliknya standar dibuat terlebih dahulu untuk mengatur praktik. Jika datangnya standar akuntansi berasal dari praktik-praktik akuntansi (berupa pelaksanaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis) dan praktik-praktik akuntansi timbul karena adanya kultur masyarakat yang mewarnai serta mempengaruhi hubungan bisnis, pasar modal, lembaga keuangan, profesi akuntansi, pemerintahan suatu negara, maka standar akuntansi akan tampak sebagai kultur yang dikendalikan oleh kekuatan pasar atau masyarakat pengguna akuntansi (Zarzeski, 1996).

Jadi kultur tumbuh dan berkembang karena merespon stimuli-stimuli lingkungannya, demikian pula perilaku pembuatan pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan dan pembuatan standar akuntansi (pengungkapan laporan keuangan) di suatu negara. Hal ini didukung oleh beberapa riset yang menunjukkan bahwa pola lingkungan suatu masyarakat atau negara akan memiliki hubungan dengan sistem atau aturan-aturan akuntansinya (Cooke, 1992; Lang dan Lundholm, 1993; Alford dkk., 1993; Wallace dkk., 1994 dan 1995; Meek dkk., 1995 serta Zarzeski, 1996).

Bursa Efek Jakarta, sebagai pasar modal yang masih berada pada tahap *emerging market*, regulasinya belum seketat seperti negara-negara maju. Peraturan-peraturan baru yang lebih ketat, antara lain: Undang-undang Pasar Modal no. 8 th 1995, rangkaian keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang dikeluarkan pada tahun 1997, usaha Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku, terus diciptakan dan diberlakukan untuk menciptakan jalan menuju terwujudnya pasar modal yang efisien.

Salah satu isu penting dalam pasar modal adalah mengenai pengungkapan laporan keuangan. Tuntutan pengungkapan laporan keuangan selalu berubah seiring dengan perkembangan pasar modal dan kehidupan sosial di suatu negara sehingga akan mengalami proses evolusi dari waktu ke waktu. Pengungkapan ini penting karena laporan keuangan merupakan salah satu informasi utama dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas publik. Adanya arah perubahan kultur sosial di Indonesia yang semakin mendapatkan momentum untuk bergerak menuju masyarakat yang

semakin transparan dan demokratis di berbagai bidang (termasuk diantaranya bidang bisnis) membuat isu ini semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Hal ini diperkuat oleh Wafa dkk. (2002: 87) bahwa salah satu atribut penting dari pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah keberadaan pengungkapan perusahaan (*corporate disclosure*).

Kultur adalah suatu kondisi yang mampu mendorong terbentuknya pola pikir dan perilaku tertentu pada individu dan masyarakat (Shudharshan dkk., 2001). Lebih luas Hofstede mendefinisikan kultur sebagai "*the collective programming of the mind which distinguishes one group category of people from another. The category of people here is the nation*" (Zarzeski, 1996; Watts, 1999; Sudharshan, 2000; Aryani, 2002). Berdasar uraian tersebut secara sederhana kultur adalah pola pikir dan cara pandang individu atau kelompok masyarakat dalam menyikapi hidup yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut Hofstede terdapat empat dimensi kultur yaitu: *individualism-collectivism*, *uncertainty avoidance*, *masculinity-femininity* dan *power distance*. (Zarzeski, 1996; Culpepper & Watts, 1999; Sudharshan dkk., 2001; Hodgetts & Luthans, 1997: 102-111)

Individualism-collectivism yaitu sejauh mana derajat individualisme yang berlaku pada suatu masyarakat atau seberapa besar derajat kolektivitas yang terjadi pada masyarakat di suatu negara. Individualisme merupakan tingkat dimana orang-orang di suatu negara lebih memilih bertindak sebagai individu daripada sebagai kelompok. Individualisme bisa didefinisikan sebagai kecenderungan orang-orang untuk hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kerabatnya dan tidak menghiraukan kepentingan masyarakat secara umum. Masyarakat di negara yang tinggi derajat individualismenya pada umumnya didukung oleh etos kerja protestan, tingginya inisiatif individu dan promosi didasarkan pada prestasi kerja.

Pada negara-negara yang derajat kolektivitasnya tinggi, individu sangat dibatasi oleh pranata sosial dan norma-norma yang menekankan pada tujuan kelompok atau orang banyak, terdapat kecenderungan orang-orang untuk berkelompok dan saling menjaga satu sama lainnya agar tercipta loyalitas. Masyarakat di negara yang tinggi derajat kolektivitasnya pada umumnya kurang didukung oleh etos kerja protestan, rendahnya inisiatif individu dan promosi didasarkan pada senioritas.

Pada level individu, derajat individualisme-kolektivisme ini bisa diukur dari seberapa besar tuntutan terhadap kesejahteraan orang banyak dan keberhasilan tujuan kelompok; seberapa keras usaha seseorang dalam mengejar tujuan atau keinginannya; seberapa besar kerelaan individu untuk berkorban demi kepentingan bersama; seberapa besar motivasi individu dalam bekerja untuk diri dan keluarganya; sejauh mana tingkat independensi seseorang dan seberapa besar tuntutan profesionalisme dalam pekerjaannya.

Uncertainty Avoidance didefinisikan sebagai tingkat dimana orang lebih menyukai situasi yang teratur atau terstruktur daripada situasi yang tidak terstruktur. Situasi yang teratur atau terstruktur menunjuk pada aturan yang jelas tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Jadi *Uncertainty Avoidance* menjelaskan tentang orang yang merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti dan telah memiliki keyakinan serta kebiasaan untuk menghindari ketidakpastian tersebut.

Masyarakat yang tidak suka dengan ketidakpastian (*high uncertainty avoidance*) biasanya membutuhkan keamanan, sangat yakin dengan keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya, aktivitasnya didasarkan pada struktur organisasi, banyak aturan-aturan tertulis, manajemennya kurang berani mengambil risiko, *labor turnover* yang rendah dan pekerjaannya kurang berambisi (misal: Jerman, Jepang, Spanyol).

Pada masyarakat dengan derajat *uncertainty avoidance* yang rendah (*low uncertainty avoidance*) pada umumnya berani mengambil risiko, hidup harus terus berjalan walaupun penuh dengan risiko, aktivitasnya kurang bertumpu pada struktur organisasi, sedikit aturan-aturan tertulis, manajer lebih berani mengambil risiko, *labor turnover* relatif tinggi, banyaknya pegawai yang berambisi, organisasi mendorong anggotanya untuk menggunakan inisiatifnya dan berasumsi bahwa mereka akan bertanggung jawab atas semua tindakannya (misal: Denmark, Inggris).

Pada level individu, operasional dari *uncertainty avoidance* bisa ditunjukkan oleh besarnya tuntutan seseorang terhadap keberadaan syarat-syarat pekerjaan dan instruksi yang rinci agar individu selalu tahu apa yang akan dilakukan; intensitas stress dan kecemasan yang menimpa seseorang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; seringnya timbul ketakutan atau kecemasan terhadap situasi yang tidak pasti dan risikonya; derajat implementasi secara konsekuen terhadap undang-undang, hukum dan peraturan yang ada.

Masculinity merupakan tingkat dimana nilai-nilai seperti *assertiveness*, performa, keberhasilan dan kompetisi yang hampir di seluruh masyarakat berhubungan dengan peranan pria. Jadi *masculinity* menunjuk pada nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat yaitu: kesuksesan, uang dan materi (kebendaan), menekankan pada pendapatan (*earning*), pengakuan atau penghargaan (*recognition*), kemajuan (*advancement*), dan tantangan (*challenge*). Individu didorong untuk menjadi pengambil keputusan yang independen, keberhasilan ditunjukkan oleh penghargaan dan kemakmuran (kekayaan), stress kerja yang tinggi dan manajer percaya bahwa bawahannya tidak suka kerja maka perlu diawasi secara ketat (misal: Jepang).

Sedangkan *femininity* menunjuk pada nilai-nilai seperti kualitas hidup, memelihara hubungan yang akrab, pelayanan, kepedulian terhadap yang lemah dan solidaritas yang hampir di seluruh masyarakat berhubungan dengan peranan wanita. Jadi *femininity* menunjuk pada nilai-nilai dominan dalam masyarakat antara lain: peduli pada sesama, kualitas hidup, mementingkan kerja sama, persahabatan (*friendly*), keamanan atau kelangsungan kerja para pegawai (*employment security*). Individu didorong untuk mengambil keputusan secara kelompok, keberhasilan ditunjukkan oleh adanya hubungan manusia dan hidup yang serasi. Di tempat kerja ditandai dengan stress kerja yang rendah, manajer memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada bawahannya serta memberi kebebasan pada mereka (misal: Norwegia).

Pada level operasional, *masculinity-femininity* ini bisa dijelaskan oleh bagaimana situasi *meeting*, apakah lebih baik jika dipimpin oleh pria; pandangan tentang pria yang seharusnya memiliki karir profesional daripada wanita; apakah pria selalu menyelesaikan masalah dengan analisis yang lebih logis sedangkan wanita lebih intuitif; apakah penyelesaian masalah-masalah organisasi efektif menggunakan cara-cara yang lebih tegas dan keras yang merupakan tipikal pria; apakah lebih baik jika pria menduduki posisi pada level yang lebih tinggi daripada wanita; apakah segala sesuatu yang bersifat material itu lebih penting; apakah benar pria dianggap lebih tegas, ambisius dan rasional dibanding wanita; dan sebagainya.

Power Distance didefinisikan sebagai tingkat ketidaksamaan diantara orang dalam suatu populasi dan bisa menggambarkan distribusi kekuasaan individu dalam suatu organisasi sehingga secara lebih luas bisa menggambarkan sejauh mana tingkat kesenjangan kekuasaan yang ada pada masyarakat di suatu negara. Jadi *power distance* menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan yang kecil

dalam suatu organisasi menerima jika kekuasaan terdistribusi secara tidak merata atau tidak sama. *Power distance* merupakan dimensi kultur yang bersifat hirarkis dan menekankan pada eksistensi rentang antara atasan-bawahan berdasarkan kekuasaan formal, simbol-simbol prestise seperti pemisahan ruang kerja, ruang makan, tempat parkir dan adanya konsensus asumsi mengenai berhakanya atasan dalam memerintah bawahan.

Power distance yang rendah (*low power distance*) diindikasikan oleh adanya desentralisasi, struktur organisasi yang bersifat datar atau pendek (*flat*), supervisor yang sedikit, tenaga kerja level bawah diisi oleh orang-orang yang berkualitas (berkompeten). Sedangkan *power distance* yang tinggi (*high power distance*) tercermin pada keberadaan sentralisasi kekuasaan, struktur organisasi yang berjenjang (tinggi), banyaknya tenaga supervisor, tenaga kerja level bawah mengisi pekerjaan yang berkualifikasi rendah. Kondisi tersebut akan memicu ketidakseimbangan kekuasaan antar berbagai tingkatan (level) dalam organisasi.

Pada level individu, kesenjangan kekuasaan ini secara operasional bisa dijelaskan oleh antara lain: apakah pimpinan mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan bawahan atau staffnya, sering menggunakan otoritasnya ketika berhadapan dengan bawahannya, jarang meminta pendapat pada bawahannya, menghindar untuk berhubungan dengan karyawannya di luar dinas. Apakah karyawan harus tidak boleh menolak terhadap keputusan manajemen dan pimpinan tidak mendelegasikan tugas pentingnya terhadap karyawannya. Apakah terjadinya kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat adalah disengaja atau diharapkan; apakah masyarakat umum sangat bergantung pada kelompok masyarakat yang memiliki akses dengan kekuasaan; bagaimana ketimpangan kekuasaan yang terjadi di masyarakat; apakah dikembangkan hubungan antara kelompok masyarakat yang lemah dalam hal akses kekuasaan dengan kelompok masyarakat yang kuat; bagaimana tuntutan masyarakat terhadap transparansi di segala bidang, dan sebagainya.

Di Indonesia, dasawarsa terakhir ini secara umum kultur yang mengitarinya mulai bergeser secara perlahan diterjang gelombang reformasi, tak terkecuali kehidupan ekonomi. Meski dengan bahasa yang berbeda, Mubyarto (1999: 52) menjelaskan bahwa kehidupan perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan dalam siklus atau periode tujuh tahunan. Kehidupan ekonomi serba susah (1966–1973), kehidupan ekonomi yang cenderung mewah dan manja pada suasana serba kemakmuran (1973–1980), kehidupan ekonomi serba prihatin dan

berhemat pada suasana serba kekurangan (1980–1987), kehidupan penuh dengan pertumbuhan di era konglomerasi (1987–1994) dan kehidupan ekonomi yang sedang krisis saat ini yang memaksa untuk memperhatikan pemberdayaan pada ekonomi rakyat (1994–2001). Puncaknya adalah dentuman dari krisis politik yang berimbas pada makin terpuruknya perekonomian Indonesia dan mulai bergesernya nilai-nilai yang bermuara pada perubahan kultur pada masyarakat akibat tuntutan reformasi, terutama dalam menyikapi kondisi lingkungannya dewasa ini. Menginjak tahun 2002 perubahan kultur di Indonesia mulai menampakkan bentuknya. Setidaknya jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1994 yang merupakan akhir periode konglomerasi, kultur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan terasa perbedaannya.

Derasnya arus demokrasi yang melanda Indonesia saat ini tentu saja akan berdampak pada terjadinya perubahan kultur yang ada pada masyarakat secara keseluruhan. Tuntutan reformasi terhadap semua sendi kehidupan di negeri ini telah membuka nilai-nilai yang dulu terkungkung. Tumbuhnya penghargaan terhadap individu, perjuangan terhadap adanya kepastian hukum, menipisnya kesenjangan kekuasaan, tuntutan transparansi dan sebagainya merupakan wujud dari perubahan itu dan akan terus bergulir sampai pada titik keseimbangannya. Terjadinya perbedaan kultur antara periode konglomerasi dan periode reformasi merupakan implikasi dari adanya perbedaan besarnya derajat *individualism-collectivism*, *uncertainty avoidance*, *masculinity-femininity* dan *power distance* yang terdapat pada masyarakat di kedua periode tersebut.

Berdasar uraian tersebut di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₁ : Terdapat perbedaan kultur masyarakat di Indonesia, antara periode konglomerasi dan periode reformasi.

Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik independen sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada pemilik modal. Laporan keuangan harus diberi pengungkapan secara memadai agar dapat dipahami oleh pengguna. Pengungkapan tersebut dapat berupa penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, kontijensi, metode persediaan, struktur kepemilikan dan sebagainya. Pengungkapan badan usaha merupakan suatu cara dalam menyalurkan pertanggungjawaban badan usaha kepada para investor untuk memudahkan alokasi sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tahunan merupakan media

yang penting untuk menyampaikan *corporate disclosure* oleh manajemen suatu badan usaha dan merupakan sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi oleh para investor. Pengungkapan berkenaan dengan informasi yang disajikan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun media komunikasi pendukung lainnya seperti: catatan kaki, peristiwa sesudah tanggal laporan, analisis manajemen mengenai operasi pada tahun yang akan datang, peramalan keuangan dan operasi, laporan keuangan tambahan mengenai pengungkapan segmen dan informasi lain di luar *historical cost*.

Berapa banyak informasi tersebut harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan. Menurut Hendriksen (1994:204), ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan yaitu: cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*). Pengungkapan cukup adalah yang paling lazim dipergunakan dari tiga pernyataan itu, meskipun hal ini menyiratkan hanya pengungkapan minim yang serasi dengan tujuan negatif untuk membuat laporan tidak menyesatkan. Wajar dan lengkap merupakan konsep yang lebih positif. Pengungkapan yang wajar secara tak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama bagi semua pembaca potensial. Pengungkapan yang lengkap menyiratkan penyajian semua informasi yang relevan. Pengungkapan yang layak mengenai informasi yang signifikan bagi para investor dan pihak lainnya hendaknya cukup, wajar dan lengkap.

Tidak ada perbedaan yang nyata di antara konsep-konsep tersebut jika semuanya dipergunakan dalam konteks yang layak. Suatu tujuan yang positif adalah memberikan informasi yang signifikan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan. Jadi luasnya cakupan atau kelengkapan (*comprehensiveness*) adalah suatu bentuk kualitas. Menurut Imhoff (1992), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun makna kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*), banyak penelitian yang menggunakan *index of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. Secara sederhana Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut Gray (1988), Alford dkk. (1993), Meek dkk. (1995) dan Zarzeski (1996), kultur masyarakat suatu negara berpengaruh pada aktivitas bisnis dan pada akhirnya juga mempengaruhi praktik-praktik

akuntansi di negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Hofstede maka peneliti berikutnya jika ingin mengetahui bagaimana dampak atau pengaruh kultur terhadap laporan keuangan dan pengungkapannya, bisa menggunakan laporan tahunan perusahaan-perusahaan pada berbagai kelompok negara yang berdasarkan riset sebelumnya memiliki kultur yang relatif berbeda. Misalnya: kelompok negara Eropah Kontinental, Latin, Asia Barat, Asia Timur, UK dan USA. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui dampak kultur terhadap praktik pengungkapan, bisa dengan cara membandingkan hasil analisa praktik pengungkapan laporan tahunan perusahaan pada berbagai kelompok negara tersebut di atas. Penelitian ini juga ingin menguji dampak kultur terhadap luas pengungkapan, dengan cara yang serupa yaitu dengan cara menguji bagaimana perbedaannya antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Berdasar uraian di atas maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₂: Terdapat perbedaan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan perbedaan kultur yang terjadi di Indonesia (perbedaan kultur antara periode konglomerasi dan periode reformasi).

Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk menguji perubahan kultur masyarakat di Indonesia, dalam hal ini adalah untuk menguji ada tidaknya perbedaan kultur antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Kuesioner yang berisi tentang dimensi kultur disebarkan kepada responden yang relatif paham tentang laporan keuangan dan praktik pengungkapan.

Kuesioner tentang kultur dikirimkan kepada sekitar 100 responden terpilih yang terdistribusi sebagai berikut: 20 orang pialang, 20 orang analis keuangan perbankan, 20 orang praktisi akuntan publik, 20 orang akademisi dan 20 orang mahasiswa akuntansi semester ahir dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3.

Data berikutnya yang digunakan adalah data *archival*, yaitu data sekunder yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), meliputi:

1. Data laporan keuangan publikasian tahunan (*annual report*) perusahaan manufaktur untuk periode yang berakhir 31 Desember 1994 dan 31 Desember 2002.
2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*

yaitu metode pemilihan sampel dengan beberapa kriteria sebagai berikut.

- Populasi yang akan diambil sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
- Perusahaan menerbitkan laporan tahunan untuk tahun buku 1994 dan 2002.
- Perusahaan tidak memperoleh opini tidak wajar (*adverse opinion*) atau tanpa pendapat (*disclaimer of opinion*).
- Sampel harus mencakup perusahaan-perusahaan yang memiliki total aktiva terkecil sampai dengan terbesar.
- Laporan tahunan perusahaan tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal.

Berdasar kriteria di atas maka perkiraan jumlah sampel adalah seperti tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Mekanisme Pemilihan Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia yang Dijadikan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEJ dan menerbitkan laporan tahunan pada 1994 dan 2002	125
Memperoleh opini wajar tanpa perkecualian	125
Tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal Indonesia	125
Berdasar tabel Isaac dan Michael, jika populasi sebesar tiap periodenya dan taraf kesalahan yang bisa di terima 10% maka besar sampel masing-masing periode	125
Sampel yang memenuhi persyaratan dan terdapat di BEJ	85
Total sampel (laporan tahunan) pada kedua periode (1994 dan 2002) berjumlah 120 laporan tahunan	60

Variabel dan Pengukurannya

Kultur

Konsep kultur yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah kondisi yang mampu mendorong terbentuknya pola pikir dan perilaku tertentu pada individu dan masyarakat yang dapat diidentifikasi dengan bagaimana keadaan *individualism-collectivism*, *uncertainty avoidance*, *masculinity-femininity*, dan *power distance* yang terjadi pada suatu masyarakat.

Instrumen penggali data yang digunakan untuk menguji apakah telah terjadi perubahan kultur

masyarakat di Indonesia adalah *questionnaire*. Instrumen ini berisi serangkaian pernyataan tertutup tentang perbedaan kultur masyarakat di Indonesia antara periode konglomerasi dan periode reformasi yang diajukan kepada responden. Skala yang dipergunakan untuk mendapatkan unit skor pada respon setiap amatan adalah skala Likert yang dikategorikan ke dalam 5 skala, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Perubahan kultur tersebut dirumuskan sebagai berikut.

$$PK = JRIK \quad (1)$$

Dalam hal ini:

PK = Perubahan Kultur

JRIK = Jawaban responden terhadap item-item pernyataan tentang perbedaan kultur masyarakat antara periode konglomerasi dan periode reformasi dengan skor: 1 (sangat tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (cukup setuju); 4 (setuju); 5 (sangat setuju).

Pengungkapan

Luasnya pengungkapan dapat dilihat dari tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kelengkapan pengungkapan bisa diproksi dengan indeks pengungkapan. Pembuatan indeks pengungkapan membutuhkan suatu instrumen yang disebut *score card* dimana desainnya bisa merefleksikan informasi yang bersifat strategis, informasi bersifat finansial dan informasi bersifat non-finansial pada suatu perusahaan secara terinci (Meek dkk., 1995). Informasi yang terinci ini akan tercermin pada masing-masing item pengungkapan. Jenis item-item pengungkapan dalam *score card* yang akan digunakan dalam penelitian ini secara umum merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya baik yang dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia, seperti Singhvi dan Desai (1971), Busby (1975), Chow dan Wong-Boren (1987), Susanto (1992), Cooke (1992), Imhoff (1992), Lang dan Lundholm (1993), Wallace dkk. (1994), Wallace dan Naser (1995), Meek dkk. (1995), Zarzeski (1996), Botosan (1997), Surti (1999), Na'im dan Rakhman (2000), Marwata (2000), Gulo (2000), Mardiyah (2001) dan Khomsiyah (2003).

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara indeks pengungkapan yang diberi bobot (*weighted*) dengan yang tidak (*unweighted*) sehingga dalam melakukan perhitungan indeks bisa menggunakan *disclosure checklist* yaitu cara yang dilakukan oleh Cooke (1992), Wallace (1994 dan 1995), Meek (1995), Surti (1999), Gulo (2000), Na'im (2000), Sabeni (2002), Khomsiyah (2003) dan Subroto (2003).

Berapa nilai indeks pengungkapan suatu perusahaan baik per kategori maupun secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut: jika jumlah maksimal item yang mungkin diraih (yang dijadikan pedoman kelengkapan atau luasnya pengungkapan) berjumlah 100 sedangkan yang dipenuhi perusahaan dalam laporan tahunannya sebanyak 50, maka indeks kelengkapan pengungkapannya sebesar $50/100 = 0,50$. Oleh karena itu, perhitungan indeks pengungkapan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Indeks}_{i,t} = n_{i,t} / K_{i,t} \quad (2)$$

Dalam hal ini:

$\text{Indeks}_{i,t}$ = Tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan perusahaan i pada periode (th) t.

$n_{i,t}$ = Jumlah item pengungkapan yang dipenuhi oleh perusahaan i pada periode (th) t.

$K_{i,t}$ = Jumlah semua item yang mungkin dipenuhi oleh perusahaan i pada periode (th) t.

Teknik Analisis Data

Alat statistik yang akan digunakan dalam membantu proses analisis adalah sebagai berikut: (1) Analisis rata-rata untuk menguji apakah telah terjadi perubahan kultur dengan cara melihat seberapa besar rata-rata nilai jawaban responden terhadap kuesioner tentang perubahan kultur masyarakat dari periode konglomerasi ke periode reformasi. (2) Uji beda (*t-test*) dua *sampel* untuk menguji apakah terdapat perbedaan luas pengungkapan laporan keuangan antara periode konglomerasi dan periode reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kultur Masyarakat Indonesia

Secara umum telah terjadi perubahan kultur di Indonesia dari periode konglomerasi ke periode reformasi. Hasil tersebut didukung oleh pendapat responden yang diwujudkan dalam bentuk jawaban terhadap kuesioner tentang kultur yang memiliki rata-rata skor 3,25. Nilai ini menunjukkan lebih dari sekedar cukup setuju jika telah terjadi perubahan kultur masyarakat di Indonesia. Kuesioner yang digunakan untuk menjaring data primer dalam penelitian ini sudah cukup *valid* dan *reliabel* (handal). Berdasar matrik korelasi terbukti bahwa item-item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner bersifat independen antara satu dengan yang lainnya, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi antar item-item variabel yang relatif rendah ke sedang yaitu antara 0,019 sampai dengan 0,50. Terlihat juga bahwa korelasi antara skor masing-masing item variabel

dengan skor totalnya berkorelasi relatif kuat dan signifikan yaitu berkisar antara 0,55 sampai dengan 0,73 sehingga bisa dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen untuk menjaring data memiliki tingkat validitas yang memadai. Koefisien Alpha sebesar 0,71 menunjukkan pula bahwa instrumen ini cukup handal atau memiliki tingkat reliabilitas yang bermakna secara statistik.

Pada periode reformasi, meskipun derajat kolektivitas masyarakat masih besar tetapi sikap atau perilaku yang bersifat individualisme mulai meningkat. Indikatornya antara lain besarnya intensitas tuntutan terhadap kesejahteraan orang banyak; besarnya tuntutan terhadap keberhasilan tujuan kelompok; individu mengejar tujuannya lebih keras setelah mempertimbangkan kesejahteraan kelompok; Individu lebih diminta untuk mengorbankan tujuannya demi tercapainya tujuan kelompok; setiap individu bekerja untuk melindungi atau menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dengan intensitas yang lebih besar; individu lebih independen atau tidak bergantung pada orang lain yang ada dalam kelompok lingkungannya; tingginya tuntutan profesionalisme disegala bidang profesi atau pekerjaan.

Dibanding dengan periode konglomerasi, di periode reformasi tingkat ketidakpastian dituntut untuk lebih diminimalkan. Indikatornya antara lain: besarnya tuntutan tentang keberadaan syarat-syarat pekerjaan dan instruksi yang rinci agar pegawai selalu tahu apa yang akan dilakukan; tingginya intensitas stress dan kecemasan yang terjadi dalam masyarakat; ketakutan terhadap situasi yang tak pasti dan risikonya adalah sesuatu yang wajar dan lebih sering terjadi; undang-undang, hukum dan peraturan yang ada, dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Di periode reformasi derajat *femininity* lebih rendah daripada di periode konglomerasi. Indikatornya antara lain: tidak hanya pria yang bisa memimpin agar rapat atau meeting berjalan baik; karier profesional tidak hanya didominasi oleh pria; pria selalu menyelesaikan masalah dengan analisis yang lebih logis sedangkan wanita lebih intuitif. Penyelesaian masalah-masalah organisasi membutuhkan cara-cara yang lebih tegas dan lebih keras yang merupakan tipikal pria; wanita juga bisa menempati posisi pada level yang tinggi dan bekerja sebaik pria meskipun pria selalu dianggap lebih tegas, lebih ambisius dan lebih rasional daripada wanita; uang dan segala sesuatu yang bersifat material merupakan hal yang juga penting.

Jika dibandingkan dengan periode konglomerasi maka di periode reformasi terdapat kecenderungan menipisnya kesenjangan kekuasaan (*power distance*) di masyarakat. Indikatornya antara lain: dalam meng-

ambil keputusan, pimpinan dituntut berkonsultasi dengan atau memperhatikan bawahannya (staffnya); pimpinan dituntut untuk tidak selalu menggunakan otoritas dan kekuasaannya ketika berhadapan dengan bawahannya; pimpinan lebih sering meminta pendapat pada para bawahannya; pimpinan jarang menghindar berhubungan dengan karyawannya di luar dinas; memungkinkan bagi karyawan untuk berkeberatan terhadap keputusan manajemen; pimpinan mulai mendelegasikan tugas pentingnya kepada karyawannya; terjadinya kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat relatif tidak disengaja dan diharapkan; berkurangnya ketergantungan masyarakat umum pada kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan; ketimpangan kekuasaan antar masyarakat semakin diminimalkan; terus dikembangkan hubungan antara kelompok masyarakat yang lemah dalam hal akses kekuasaan dengan kelompok masyarakat yang kuat; tuntutan transparansi di segala bidang lebih besar.

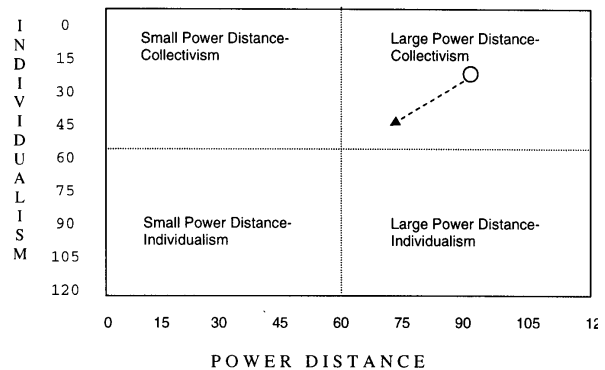
Indikator-indikator tersebut di atas setidaknya telah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kultur di Indonesia. Perubahan kultur tersebut secara sederhana bisa digambarkan dengan menggunakan diagram hubungan antara *power distance* dan *individualism-collectivism*; *power distance* dan *uncertainty avoidance*; *uncertainty avoidance* dan *masculinity-femininity* seperti tersaji pada table 2, 3 dan 4.

Berdasar tabel 2, pada periode konglomerasi posisi Indonesia terletak pada kuadran *large power distance - collectivism* yang ditunjukkan oleh nilai indeks *power distance* berkisar 80 dan derajat individualisme bernilai sekitar 16 (Hodgetts dan Luthans, 1997). Organisasi yang ada di negara-negara yang berada pada kuadran ini biasanya kekuasaan bersifat sentralistik, struktur organisasi berjenjang (tinggi), tenaga supervisor relatif banyak, tenaga kerja level bawah biasanya mengisi pekerjaan yang berkualifikasi rendah sehingga memicu kesenjangan kekuasaan antar berbagai tingkatan manajemen dalam organisasi, orang-orangnya cenderung berkelompok dan saling menjaga agar tercipta loyalitas, kurang didukung oleh etos kerja protestan, inisiatif individu yang rendah dan promosi didasarkan pada senioritas.

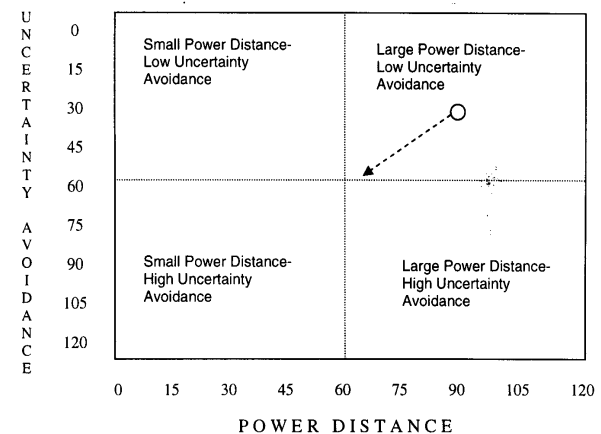
Penelitian ini membuktikan bahwa di periode reformasi telah terjadi pergeseran posisi dimensi *power distance* dan *individualism-collectivism* meskipun belum bisa memastikan berapa nilai indeks *power distance* dan derajat *individualism*. *Large power distance* mulai menurun dan derajat *individualism* mulai meningkat. Fakta menunjukkan bahwa di periode reformasi telah banyak organisasi (perusahaan) yang melakukan perampingan struktur

organisasi, pendelegasian wewenang dengan desentralisasi kekuasaan, inisiatif individu mulai tumbuh dan banyak promosi yang didasarkan pada prestasi kerja.

Tabel 2. Diagram Hubungan antara *Power Distance* dan *Individualism-Collectivism*



Tabel 3. Diagram Hubungan antara *Power Distance* dan *Uncertainty Avoidance*

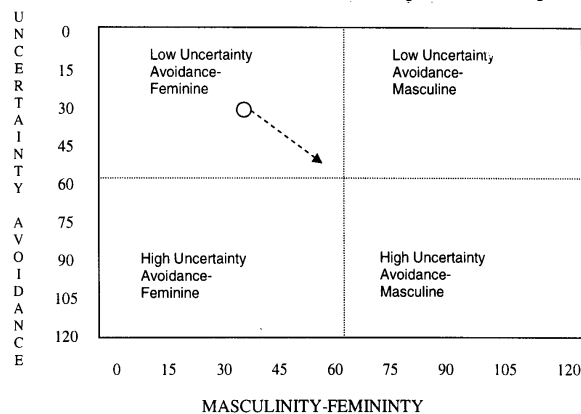


Berikutnya berdasarkan diagram hubungan antara *power distance* dan *uncertainty avoidance* pada tabel 3 terlihat bahwa pada periode konglomerasi posisi Indonesia berada pada kuadran *large power distance - low uncertainty avoidance*. Posisi ini ditandai oleh adanya sentralisasi kekuasaan dan panjangnya struktur organisasi yang berakibat pada terciptanya aktivitas manajer dan para bawahannya kurang bertumpu pada struktur organisasi yang ada, sedikitnya aturan tertulis, manajer lebih berani mengambil risiko, *labor turn-over* relatif tinggi dan organisasi mendorong anggotanya untuk menggunakan inisiatifnya (Hodgetts dan Luthans, 1997).

Meskipun belum bisa menunjukan posisi nilai indeks secara pasti tetapi penelitian ini membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran posisi dimensi *power distance-uncertainty avoidance* di Indonesia pada periode reformasi, yang ditandai oleh semakin banyak

organisasi yang melakukan desentralisasi kekuasaan, restrukturisasi organisasi untuk mendorong efisiensi, semakin besarnya tuntutan terhadap kejelasan pekerjaan yang dituangkan dalam aturan-aturan tertulis sehingga aktivitas organisasi berjalan berdasar pada struktur organisasi dan manajer lebih berhati-hati dalam hal pengambilan keputusan. Jadi di periode reformasi kesenjangan kekuasaan mulai menipis dan masyarakat mulai cenderung tidak suka dengan ketidakpastian.

Tabel 4. Diagram Hubungan antara *Uncertainty Avoidance* dan *Masculinity-Femininity*



Tabel 4 menunjukkan bahwa pada periode konglomerasi posisi Indonesia berada di kuadran *low uncertainty avoidance – feminine*. Meskipun secara umum aktivitas orang-orang dalam organisasi kurang bertumpu pada struktur organisasi, adanya aturan-aturan tertulis yang relatif sedikit dan manajer berani mengambil risiko tetapi pengambilan keputusan masih memperhatikan keputusan secara kelompok dan keberhasilan ditunjukkan oleh adanya hubungan kerja sama, persahabatan dan kelangsungan pekerjaan (Hodgetts dan Luthans, 1997).

Posisi tersebut mulai berubah pada periode reformasi yang ditandai oleh semakin besarnya tuntutan terhadap kejelasan pekerjaan yang dituangkan dalam aturan-aturan tertulis sehingga aktivitas organisasi berjalan berdasar pada struktur organisasi dan manajer lebih berhati-hati dalam hal pengambilan keputusan dengan tetap menjaga sikap independen. Keberhasilan individu mulai ditunjukkan oleh keberadaan penghargaan dan kemakmuran (kekayaan), stress kerja meningkat dan manajer yakin bahwa para bawahannya masih banyak yang tidak suka kerja sehingga perlu diawasi secara ketat. Jadi di periode reformasi secara umum masyarakat mulai tidak menyukai ketidakpastian (bergerak ke arah *high uncertainty avoidance*) dan mulai berorientasi pada pendapatan (uang), pengakuan keberhasilan (*recognition*) dan tantangan (*challenge*).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kultur di Indonesia antara periode konglomerasi dan periode reformasi dapat diterima.

Dampak Perbedaan Kultur terhadap Variabilitas Luas Pengungkapan

Laporan Keuangan

Menurut Alford dkk. (1993), Meek dkk. (1995) dan Zarzeski dkk. (1996), eksistensi perusahaan dan aktivitas bisnis (termasuk di dalamnya praktik-praktik akuntansi dan keuangan) keberadaannya dipengaruhi oleh kultur yang ada pada masyarakat sekitarnya. Alford menguji pengaruh kultur masyarakat terhadap akurasi kandungan informasi dalam pengungkapan laporan keuangan secara tidak langsung dengan cara melakukan survey pada berbagai negara di Eropa, USA, Jepang dan Afrika Selatan. Data hasil survey pada masing-masing negara disusun dalam bentuk tabel dan grafik, selanjutnya dibandingkan antara satu negara dengan negara lainnya dan dianalisis secara kualitatif. Meek melihat pengaruh kultur terhadap luas pengungkapan dengan cara memperlakukan kultur sebagai variabel *dummy* yaitu dengan cara mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah USA di satu pihak dan perusahaan-perusahaan di wilayah UK serta Eropa kontinental di pihak lain. Zarzeski menguji pengaruh kultur terhadap luas pengungkapan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pertama, melakukan survey dengan menyebar kuesioner kepada para pegawai yang ada pada perusahaan-perusahaan sampel di 64 negara. Cara kedua adalah secara tidak langsung yaitu dengan melakukan regresi karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan pada perusahaan-perusahaan sampel yang beroperasi di Perancis, Jerman, Hong Kong, Jepang, UK dan USA. Zarzeski beranggapan bahwa perbedaan kultur masyarakat di dunia ini bisa direpresentasikan oleh enam negara tersebut. Hasil regresi pada keenam negara tersebut selanjutnya dibandingkan dan dianalisis sejauh mana perbedaannya, variabel-variabel karakteristik perusahaan apa saja yang signifikan berpengaruh terhadap variasi luas pengungkapan laporan keuangan pada masing-masing negara.

Penelitian ini melihat perbedaan kultur berdasarkan interval waktu yang telah dilalui oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia khususnya perusahaan manufaktur. Interval atau periode waktu yang bisa diidentifikasi perbedaan kulturnya adalah didasarkan pada argumen Mubyarto (1999) yaitu periode konglomerasi yang berakhir

pada tahun 1994 dan periode reformasi yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hasil survey yang telah dijelaskan di atas membuktikan bahwa kultur di kedua periode tersebut memang berbeda.

Selanjutnya kami menguji bagaimana dampak masing-masing kultur tersebut terhadap luas pengungkapan dengan cara tidak langsung seperti metode yang digunakan oleh Alford (1993) dan Zarzeski (1996). Pengujian hipotesis kami lakukan dengan menggunakan alat statistik uji beda (*t-test two samples*) terhadap luas pengungkapan. Berdasarkan pada hasil uji beda (*t-test two samples*) dengan toleransi tingkat kesalahan sebesar 5% secara umum terbukti bahwa terdapat perbedaan luas pengungkapan antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Hal ini didukung oleh hasil uji beda luas pengungkapan antara periode konglomerasi dan periode reformasi menunjukkan nilai probabilitas kesalahan sebesar 0,00.

Tumbuhnya penghargaan terhadap individu, perjuangan terhadap kepastian hukum, mulai menipisnya kesenjangan kekuasaan, tingginya tuntutan akan transparansi di segala bidang yang mewarnai kultur di periode reformasi telah memaksa perusahaan publik untuk berusaha mengungkapkan sebanyak mungkin informasi relevan yang berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan. Aktivitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada publik, dalam hal ini para investor dan investor potensial. Praktik pengungkapan seperti ini tidak mungkin terjadi di periode konglomerasi karena sebagai faktor eksternal kultur masyarakat yang ada tidak mampu menekan perusahaan untuk bersikap lebih transparan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan besaran yang signifikan terhadap rata-rata indeks pengungkapan yaitu 0,233 pada periode konglomerasi dan 0,436 pada periode reformasi.

Praktik pengungkapan laporan keuangan mencakup pengungkapan yang wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib merupakan penyajian informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan beserta penjelasannya yang telah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia. Pengungkapan sukarela adalah penyampaian kepada publik tentang informasi relevan lainnya baik itu informasi strategis, informasi keuangan dan non-keuangan, yang diharapkan bisa meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan di pasar modal. Walaupun skor rata-rata indeks pengungkapan laporan keuangan di periode reformasi meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan di periode konglomerasi, tetapi masih banyak item-item informasi sukarela yang tidak diungkap oleh kebanyakan perusahaan.

Item-item informasi sukarela tersebut antara lain: uraian tentang strategi dan tujuan perusahaan secara umum; uraian tentang strategi dan tujuan perusahaan dari aspek finansial, marketing dan sosial; dampak dari strategi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang diharapkan oleh perusahaan; riset dan pengembangan; *forecasting* penjualan, laba, aliran kas baik secara kuantitatif maupun kualitatif; informasi tentang direktur atau manajer dan pegawai, informasi tentang nilai tambah perusahaan dan *financial review*. Keengganan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat sukarela tersebut kemungkinan sangat terkait dengan usaha untuk menghindari *competitive disadvantage*.

Kultur masyarakat di periode reformasi secara umum mampu mendorong perusahaan untuk membuat pengungkapan secara lebih luas di dibandingkan dengan di periode konglomerasi, hal ini menunjukkan bahwa kultur masyarakat setidaknya berpengaruh terhadap luas pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan. Hasil analisis uji beda tersebut di atas memperkuat bukti bahwa kultur lingkungan di tempat perusahaan berada berdampak pada aktivitas perusahaan. Temuan ini sesuai dengan Alford dkk. (1993), Meek dkk. (1995) dan Zarzeski (1996) bahwa aktivitas bisnis perusahaan dipengaruhi oleh kultur masyarakat sekitarnya tak terkecuali praktik-praktik akuntansi dan keuangan yang salah satunya tercermin pada luas pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu hipotesis alternatif (H_2) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan luas pengungkapan antara periode konglomerasi dan periode reformasi bisa diterima.

KESIMPULAN

1. Terjadi perubahan kultur masyarakat di Indonesia yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan kultur masyarakat antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Jika dibandingkan dengan periode konglomerasi maka kultur masyarakat pada periode reformasi relatif lebih individualis, relatif lebih maskulin, cenderung *high uncertainty avoidance* dan cenderung *small power distance*.
2. Secara umum terdapat perbedaan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Hal ini membuktikan bahwa perubahan kultur masyarakat berdampak terhadap praktik pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia.

KETERBATASAN DAN PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan kultur dan perusahaan sampel. Kultur masyarakat dalam penelitian ini merupakan faktor eksternal yang dampaknya terhadap praktik pengungkapan laporan keuangan diuji secara tidak langsung, dengan cara melakukan uji beda dua sampel terhadap luas pengungkapan antara periode konglomerasi dan periode reformasi. Meskipun metode ini telah membuktikan adanya pengaruh kultur terhadap variasi praktik pengungkapan tetapi hasil penelitian ini hanya menunjukkan gejala secara umum saja.

Penelitian ini memiliki masalah dalam hal validitas eksternal yang relatif lemah. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi karena laporan keuangan yang dijadikan sampel hanya perusahaan-perusahaan pamanufakturan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Struktur akuntansi yang tercermin pada laporan keuangan antara perusahaan pamanufakturan dan non-pamanufakturan memiliki perbedaan karakteristik. Secara umum dalam perusahaan pamanufakturan terdapat antara lain: persediaan bahan baku, barang jadi dan barang dalam proses, aktiva produktif berupa mesin produksi, tenaga kerja langsung serta bahan pembantu sedangkan transaksi ini tidak terdapat pada perusahaan non pamanufakturan. Adanya perbedaan transaksi tersebut tentu akan berdampak pada luasnya pengungkapan laporan keuangan perusahaan secara relatif.

Berdasar pada keterbatasan di atas maka untuk penelitian berikutnya bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengujian pengaruh kultur masyarakat terhadap luas pengungkapan bisa dilakukan secara langsung dengan cara menggunakan pegawai-pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel sebagai responden yang akan menjawab kuesioner tentang kultur.
- 2) Guna mendukung generalisasi hasil penelitian, meskipun ada perbedaan karakteristik antara perusahaan pamanufakturan dan non-pamanufakturan maka hendaknya juga menggunakan sampel perusahaan non-pamanufakturan. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kelompok sampel perusahaan pamanufakturan untuk dianalisis lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, A., J. Jones, R. Leftwich dan M. Zmijewski, 1993 "The Relative Informativeness of Accounting Disclosures in Different Countries", *Journal of Accounting Research*, 31, Supplement, hlm. 183 - 223.
- Aryani, Y. A., Pebruari 2002, Wiwin Hendriastuti, "Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja dari Perspektif Konsumen dalam *Balance Scorecard*", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2., No. 1., hlm. 46-62.
- Ben Shaw-Ching Liu, Oliver Furrer, D. Sudharshan, Nov 2001, "The Relationship Between Culture and Behavioral Intentions toward Services", *Journal of Service Research*, Vol. 4, No. 2, hlm. 118-129.
- Botosan, Christine A., , July 1997, "Disclosure Level and the Cost of Equity Capital", *The Accounting Review*, Vol. 72, No. 3 hlm. 323-349.
- Buzby, S. L., 1975, "Company Size, Listed versus Unlisted Stocks, and Extent of Financial Disclosure", *Journal of Accounting Research*, Spring, hlm. 16 - 37.
- Beaver, William H, June 1996, "Directions in Accounting Research: Near and Far", *Accounting Horizons*, Vol. 10 No. 2, hlm. 113-124.
- Cooke, T. E., 1992, "The Impact of Size, Stock Market Listing and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations", *Accounting and Business Research*, 22, Summer, hlm. 229-237.
- _____, June 1993, "Disclosure in Japanese Corporate Annual Reports", *Journal of Business Finance & Accounting*, 20, hlm. 521 - 535.
- Chow, Chee W., A. Wong-Boren, July 1987, "Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporations", *The Accounting Review*, Vol. LXII, No. 3, hlm. 533-540.
- Culpepper, Robert A., Larry Watts, 1999, "Measuring Cultural Dimensions at the Individual Levels: An Examination of the Dorfman and Howell (1988) Scales and Robertson and Hofman (1999) Scale", *Academy of Strategic and Organizational Leadership Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm. 22-34.
- Departemen Keuangan RI, Bapepam, September 1996, "Pokok-pokok Materi UU Pasar Modal", Disampaikan pada seminar sehari "Potensi-potensi Kejahatan di Bursa Efek", FH UGM Yogyakarta.
- Furrer, Oliver, Ben Shaw-Ching Liu, D. Sudharshan, May 2000, "The Relationship Between Culture and Service Quality Perceptions", *Journal of Service Research*, Vol. 2, No. 4, hlm. 355-371.
- Gray, S. J., March 1988, "Toward a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally", *Abacus*, 24, hlm. 1-15.

- Gulo, Yamotuho, April 2000, "Analisis Efek Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap Cost of Equity Capital Perusahaan", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, hlm. 45-62.
- Hodgetts, Richard M., Fred Luthan, 1997. *International Management*, Third Edition, Singapore, McGraw-Hill Companies, Inc.
- Hendriksen, Eldon S., 1994. *Teori Akuntansi*, Edisi 4, Penerbit Erlangga.
- Imhoff Jr., E. A., 1992, "The Relation Between Perceived Accounting Quality and Economic Characteristics of the Firm", *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.11, Summer, hlm. 97-118.
- Khomsiyah dan Susanti, Oktober 2003, "Pengungkapan, Asimetri Informasi dan Cost of Capital", Simposiun Nasional Akuntansi VI.
- Lang, M., and R. Lundholm, 1993, "Cross-sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures", *Journal of Accounting Research*, 31, Autumm, hlm. 246 - 271.
- _____, 1996, "Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior", *The Accounting Review*, Vol. 71, No. 4, October, hlm. 467 – 492.
- Mardiyah, A. A., 2001, "Pengaruh Assimetri Informasi dan Disclosure terhadap Cost of Capital", Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Meek, Gary K., Clare B. Robert, Sidney J. Gray, 1995, "Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U. S., U. K., and Continental European Multinational Corporations", *Journal of International Business Studies*, Vol. 26, Third Quarter, hlm. 555-572.
- Mubyarto, 1999, "Reformasi Sistem Ekonomi", Edisi Kedua, Aditya Media, Yogyakarta.
- Na'im, A. Fu'ad Rakhman, 2000, "Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, no. 1. hlm. 70 - 82.
- Sabeni, A., September 2002, "An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director's Composition and the Level of Voluntary Disclosure", The Fifth Indonesian Conference on Accounting, Semarang, hlm. 46 - 57.
- Singhvi, Surendra S., Harsha B. Desai, January 1971, "An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure", *The Accounting Review*, hlm. 129-138.
- Subroto, Bambang, 2003, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kepada Ketentuan Pengungkapan Wajib oleh Perusahaan Perusahaan Publik dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Para Investor di Pasar Modal", *Disertasi Doktor*, Universitas Gadjahmada, Indonesia.
- Susanto, Djoko, 1992, "An Empirical Investigation of The Extent of Corporate Disclosure in Annual Reports Companies Listed on The Jakarta Stock Exchange", *Ph.D dissertation*, University of Arkansas, USA.
- Suripto, Bambang, September 1999. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Perusahaan*, SNA II IAI-KAPd.
- Wafa, A.S., Sulaiman T., Ong Fun Aik, September 2002, *Accountants View of Attributes of Corporate Governance in Malaysian Public Listed Companies*, The Fifth Indonesian Conference on Accounting, Semarang, hlm. 87- 95.
- Wallace, R. S. Olusegun, Kamal Naser, dan Aracelu Mora, 1994, "The Relation Between the Comprehensiveness of Corporate Annual Report and Firm Characteristics in Spain", *Accounting and Business Research*, Vol. 25, Winter, hlm. 41 – 53.
- Wallace, R. S. Olusegun, Kamal Naser, 1995, "Firm-Specific Determinants of the Comprehensiveness of Mandatory Disclosure in the Corporate Annual Reports of Firms Listed on the Stock Exchange of Hong Kong", *Journal of Accounting and Public Policy*, 14, hlm. 311– 368.
- Zarzeski, M.P, March 1996, "Spontaneous Harmonization Effects of Culture and Market Force on Accounting Disclosure Practices", *Accounting Horizons*, Vol. 10, No. 1, hlm. 18-37.